

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penelitian ini menyoroti proses *collaborative governance* yang telah diterapkan dalam tata kelola Mikrotrans ke dalam sistem JakLingko di Kota Jakarta, khususnya pada rute Jak.36 Cilangkap-Cililitan. Proses ini mencerminkan pentingnya kolaborasi yang efektif antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, operator Mikrotrans, dan masyarakat pengguna. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan utama dalam proses kolaborasi tata kelola Mikrotrans dalam sistem JakLingko dimulai dari dimensi pertama, yaitu dialog tatap muka. Frekuensi pertemuan yang tinggi antara pemangku kepentingan, seperti PT Transportasi Jakarta, BP BUMD, dan Dinas Perhubungan, menjadi platform strategis untuk membahas isu-isu operasional dan evaluasi kinerja. Namun, meskipun pertemuan ini terjadwal secara formal, masih terdapat kekurangan dalam efektivitas komunikasi yang menyebabkan keterlambatan dalam mencapai kesepakatan dan solusi atas permasalahan yang muncul.

Pada proses *collaborative governance*, seluruh komponen dimensi di dalamnya menjadi satu kesatuan yang akan menghadirkan hasil sementara sebagai sebuah kemenangan kecil. Proses kedua, dimensi membangun kepercayaan, menunjukkan bahwa kepercayaan antara pemangku kepentingan tidak terbentuk secara instan, melainkan memerlukan waktu dan usaha yang berkesinambungan. Hal ini juga secara tidak langsung menjadi sebuah tantangan, di mana kepercayaan menjadi elemen krusial dalam kolaborasi, karena tanpa adanya rasa saling percaya, koordinasi dan komitmen untuk

mencapai tujuan bersama akan sulit terwujud. Keterbatasan komunikasi yang efektif menyebabkan munculnya persepsi yang berbeda terkait prioritas dan tanggung jawab masing-masing pihak, sehingga memperlambat proses penyelesaian masalah.

Dalam proses membangun kepercayaan, keterlibatan aktif para pemangku kepentingan sangat penting untuk mendorong terciptanya dimensi komitmen. Meskipun hasil yang diharapkan mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan kepentingan individu, komitmen kolektif menjadi faktor pendorong utama dalam berjalannya proses kolaborasi. Para pemangku kepentingan menunjukkan kesiapan untuk terlibat aktif melalui partisipasi dalam rapat koordinasi, diskusi teknis, dan pengambilan keputusan bersama, yang memperkuat keterlibatan mereka dalam mencapai tujuan bersama.

Dalam proses selanjutnya, yakni pemahaman bersama, hasil penelitian menekankan pentingnya keselarasan pemahaman antara semua pemangku kepentingan mengenai visi program dan manfaat tata kelola mikrotrans. Kendala utama yang dihadapi dalam kolaborasi ini berkaitan dengan anggaran dan pencapaian target yang harus dipenuhi oleh TransJakarta. Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam penyediaan layanan Mikrotrans yang optimal, sedangkan pencapaian target yang ditetapkan memerlukan koordinasi yang lebih intensif di antara pemangku kepentingan. Diskusi dan rapat koordinasi menjadi metode penting untuk mencari solusi atas kendala tersebut, mencerminkan pentingnya pemahaman bersama dalam mengatasi permasalahan yang kompleks.

Pada dimensi hasil sementara, meskipun tata kelola mikrotrans masih dalam tahap pengembangan, kemajuan yang dicapai sudah dianggap cukup baik. Kesesuaian dalam

pengembangan proses tata kelola dan implementasi nyata dari kesepakatan menunjukkan bahwa kolaborasi yang baik antara pemerintah, operator, dan masyarakat dapat menghasilkan perubahan positif dalam sistem transportasi publik di Jakarta. Dengan demikian, proses *collaborative governance* ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, menciptakan sistem transportasi yang lebih efisien, tertata kelola, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jakarta serta pembahasan ini menunjukkan bahwa proses *collaborative governance* telah berjalan dengan baik dan berpotensi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jakarta melalui sistem transportasi yang lebih efisien dan tertata kelola.

4.2. Saran

Berdasarkan Fenomena proses *collaborative governance* dalam tata kelola mikrotrans ke dalam sistem JakLingko di Jakarta, peneliti menguraikan beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan hasil yang diharapkan:

1. Pada subfenomena dialog tatap muka, para pihak *stakeholders* harus melakukan peningkatan frekuensi dan kualitas pertemuan dengan cara mengadakan pertemuan lebih sering dengan format yang bervariasi, termasuk workshop dan diskusi kelompok kecil, untuk membahas isu-isu operasional dan evaluasi kinerja.
2. Pada subfenomena pemahaman bersama, Para pihak *stakeholders* harus melakukan penguatan keterbukaan informasi dan komunikasi, dimana hal ini dapat membantu meningkatkan keterbukaan informasi dengan menyediakan *platform* digital yang memungkinkan semua pemangku kepentingan mengakses

data dan informasi terkini mengenai program tata kelola mikrotrans. Ini dapat mencakup laporan berkala, analisis kinerja, dan update tentang langkah-langkah yang diambil.

3. Dilakukan upaya untuk membangun kepercayaan oleh PT Transportasi Jakarta dengan pemangku kepentingan lain melalui kegiatan bersama, seperti pelatihan atau studi banding ke daerah yang telah berhasil melakukan tata kelola sistem transportasi. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan memperkuat hubungan antar pemangku kepentingan agar rasa saling percaya di antara mereka semakin meningkat.
4. Pada subfenomena hasil sementara, *stakeholders* perlu menetapkan mekanisme evaluasi yang terstruktur untuk menilai kemajuan dan hasil dari kolaborasi secara berkala. Ini termasuk penentuan indikator kinerja utama (KPI) yang jelas sehingga semua pihak dapat memahami kontribusi mereka terhadap tujuan bersama.
5. Pada permasalahan sub-fenomena Pemahaman bersama *stakeholders* dapat membuat forum atau survei yang melibatkan masyarakat pengguna untuk mendapatkan masukan langsung mengenai kebutuhan dan harapan mereka terhadap sistem transportasi.

Dengan menerapkan saran-saran di atas, diharapkan proses *collaborative governance* dalam tata kelola Mikrotrans ke dalam sistem JakLingko dapat berjalan lebih efektif, menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat Jakarta, serta menciptakan sistem transportasi publik yang lebih efisien dan berkelanjutan.